



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450
Telepon: (021) 3905876/77 Faksimile: (021) 31903755
Website: www.komisiyudisial.go.id, Email: kyri@komisiyudisial.go.id

Nomor: 28/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/07/2026

UNTUK DITERBITKAN SEGERA

Jakarta, 30 Juli 2026

KY Terima 440 Permohonan Pemantauan dan 182 Inisiatif KY pada Januari s.d. Juni 2026

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menerima 440 permohonan pemantauan persidangan dan 182 inisiatif KY dan Penghubung KY pada Januari s.d. Juni 2026 sebagai upaya pencegahan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan permohonan pemantauan pada periode Januari s.d. Juni 2025 yang tercatat sebanyak 357 permohonan pemantauan dan 129 inisiatif KY dan Penghubung KY.

"KY melakukan pemantauan terhadap persidangan pada sejumlah perkara yang menjadi perhatian publik guna memastikan proses peradilan berjalan sesuai prinsip independensi, imparialitas, dan integritas hakim. Pemantauan persidangan ini diharapkan akan berdampak pada kepatuhan hakim dalam menjalankan KEPPH," ujar Anggota KY selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi saat menggelar konferensi pers secara daring, Kamis (30/7/2026).

Objek pemantauan persidangan yang diamati meliputi perilaku hakim, proses persidangan, serta pemantauan pada situasi dan kondisi pengadilan.

Berdasarkan jenis perkara, Abhan memperinci lebih lanjut perkara-perkara yang dimohonkan dan inisiatif untuk dilakukan pemantauan persidangan. Yaitu perdata (260) seperti perbuatan melawan hukum dan wanprestasi; pidana biasa (87) seperti prosedur penahanan dan independensi hakim; tindak pidana korupsi (85), tata usaha negara (36) seperti sengketa kebijakan publik atau jabatan; pidsus anak dan perempuan (32), hubungan industrial (27), praperadilan (22), narkoba (14), niaga (12), ITE (11), lingkungan (8), militer (6), agama (4) terkait hak asuh anak atau pembagian harta gono gini; perdagangan manusia (3), pajak (1), dan lainnya (14).

"Sepuluh daerah yang paling banyak melakukan permohonan pemantauan dan inisiatif, yaitu Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Riau, Sumatera Utara, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, dan Kalimantan Barat," tambah Abhan.

Adapun dilihat dari jenis badan peradilan, masih didominasi oleh pengadilan negeri (443), kemudian Mahkamah Agung (94), pengadilan tinggi (29), pengadilan agama (21), pengadilan tata usaha negara (20), pengadilan tinggi tata usaha negara (4), pengadilan militer (5), pengadilan tinggi agama (3), mahkamah syar'iyah (1), pengadilan militer tinggi (1) dan pengadilan pajak (1).

"Sebagai hasil tindak lanjut permohonan pemantauan, ada 134 tidak dilakukan pemantauan, 181 pemantauan langsung dengan realisasi 92 perkara, serta 103 pemantauan tidak langsung, dan 1 permohonan dilimpahkan ke bagian lain," lanjut Abhan.

"Karena pemantauan bersifat pencegahan, hakim yang dipantau cenderung berperilaku sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dalam proses persidangan, hakim juga telah menerapkan hukum acara yang sesuai. Misal, hakim membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Hakim juga mengedepankan praduga tak bersalah. Terkait situasi dan kondisi pengadilan, sidang juga berjalan sesuai jadwal yang ditentukan. KY juga mengamati fasilitas dan dukungan pengadilan yang cukup baik," ungkap Abhan.

Abhan juga mengungkapkan KY telah melakukan pemantauan persidangan pada kasus-kasus yang menarik perhatian publik, seperti kasus ABK kapal pengangkut sabu 2 ton di Batam, Sengketa Negotiable Certificate of Deposit PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) Jusuf Hamka dan MNC Asia Holding Group Hary Tanoesoedibjo, kasus penyiraman air keras Andrie Yunus, dugaan tipikor pada kasus Amsal Sitepu di Medan, korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tahun 2018–2023 PT Pertamina dengan terdakwa Kerry Adrianto Riza, korupsi pengadaan laptop Chromebook.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Pusat Analisis dan Layanan Informasi KY

Jl. Kramat Raya No.57, Jakarta Pusat,

(021) 3906189

www.komisiyudisial.go.id

email: humas@komisiyudisial.go.id



#KinerjaKY

PENANGANAN LAPORAN MASYARAKAT

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA



PERIODE JANUARI - JUNI 2026

PEMANTAUAN PERSIDANGAN



PERMOHONAN
PEMANTAUAN PERSIDANGAN

Januari s.d. Juni 2026

440



INISIATIF KY DAN
PENGHUBUNG KY

Januari s.d. Juni 2026

182

PERBANDINGAN JANUARI s.d. JUNI

PERMOHONAN PEMANTAUAN PERSIDANGAN

2025

357

permohonan



NAIK

23,25%

2026

440

permohonan

INISIATIF KY DAN PENGHUBUNG KY

2025

129

inisiatif



NAIK

41,09%

2026

182

inisiatif



Pemantauan persidangan adalah langkah pencegahan agar hakim dapat mematuhi KEPPH pedoman dan panduan berperilaku bagi hakim untuk mencapai kondisi peradilan yang ideal. Hakim diharapkan bersikap independen dan imparsial dalam memutus, tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun.





#KinerjaKY

PENANGANAN LAPORAN MASYARAKAT

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA



PERIODE JANUARI - JUNI 2026



JUMLAH PEMANTAUAN PERSIDANGAN BERDASARKAN JENIS PERKARA

Berdasarkan jenis perkara, Komisi Yudisial menerima permohonan dan inisiatif untuk dilakukan pemantauan persidangan dari berbagai jenis perkara.



Data mencakup permohonan pemantauan persidangan dan inisiatif Komisi Yudisial serta Penghubung Komisi Yudisial dari berbagai jenis perkara.

JENIS PERKARA	JUMLAH	%
Perdata	260	(41,80%)
Pidana Biasa	87	(13,99%)
Tindak Pidana Korupsi	85	(13,67%)
Tata Usaha Negara	36	(5,79%)
Pidsus Anak dan Perempuan	32	(5,14%)
Hubungan Industrial	27	(4,34%)
Praperadilan	22	(3,54%)
Narkotika	14	(2,25%)
Niaga	12	(1,93%)
ITE	11	(1,77%)
Lingkungan	8	(1,29%)
Militer	6	(0,96%)
Agama	4	(0,64%)
Perdagangan Manusia	3	(0,48%)
Pajak	1	(0,16%)
Lainnya	14	(2,25%)



#KinerjaKY

PENANGANAN LAPORAN MASYARAKAT

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA



PERIODE JANUARI - JUNI 2026

PERMOHONAN PEMANTAUAN PERSIDANGAN BERDASARKAN JENIS BADAN PERADILAN

**TOTAL**
622
PRRKARA

Pengadilan Negeri

443 71,22%



Mahkamah Agung

94 15,11%



Pengadilan Tinggi

29 4,67%



Pengadilan Agama

21 3,4%

Pengadilan Tata
Usaha Negara

20 3,22%



Pengadilan Militer

5 0,30%

0,50%



Pengadilan Tinggi Agama

3 0,48%

0,58%



Majelis Syariah

1 0,16%

0,16%



Pengadilan Militer

1 0,16%

0,16%



Pengadilan Pajak

1 0,16%

0,16%

10 WILAYAH YANG PALING BANYAK MELAKUKAN PERMOHONAN PEMANTAUAN





#KinerjaKY

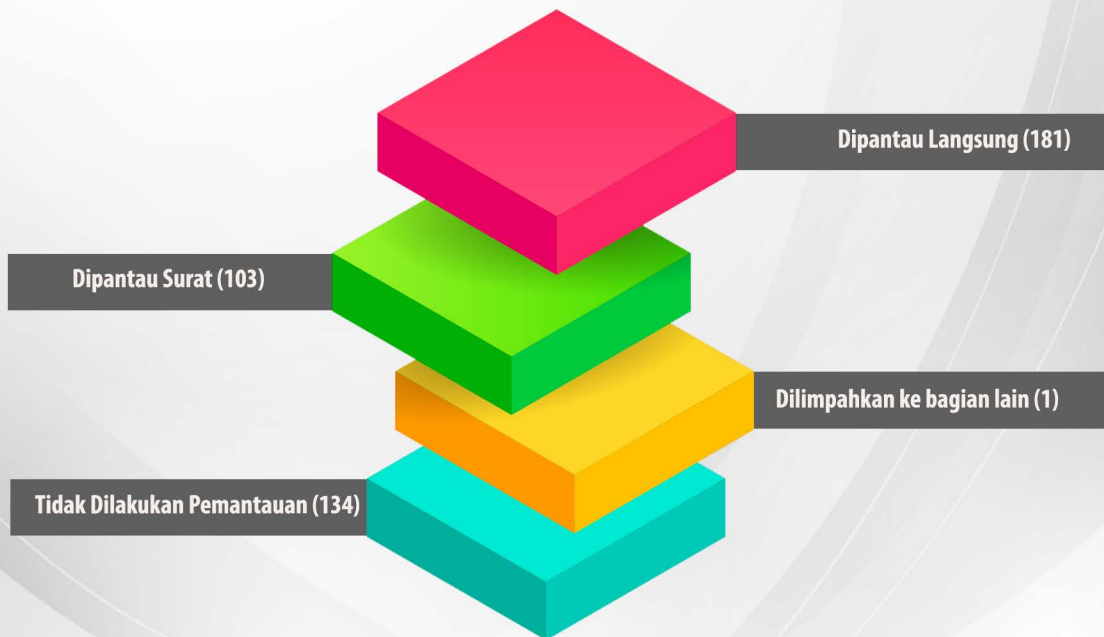
PENANGANAN LAPORAN MASYARAKAT

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA



PERIODE JANUARI - JUNI 2026

TINDAK LANJUT PERMOHONAN PEMANTAUAN PERSIDANGAN



“

Karena pemantauan bersifat pencegahan, hakim yang dipantau cenderung berperilaku sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dalam proses persidangan, hakim juga telah menerapkan hukum acara yang sesuai. Misal, hakim membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Hakim juga mengedepankan praduga tak bersalah. Terkait situasi dan kondisi pengadilan, sidang juga berjalan sesuai jadwal yang ditentukan. KY juga mengamati fasilitas dan dukungan pengadilan yang cukup baik.



#KinerjaKY

PENANGANAN LAPORAN MASYARAKAT

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA



PERIODE JANUARI - JUNI 2026

PEMANTAUAN PERSIDANGAN YANG MENARIK PERHATIAN PUBLIK



1

Perkara Narkotika:

- Kasus Peredaran narkoba jaringan Thailand-Indonesia
- Kasus ABK Kapal Pengangkut Sabu 2 Ton di Batam



2

Perkara Gugatan Perlawanan Hukum :

- Sengketa *Negotiable Certificate of Deposit* PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) Jusuf Hamka dan MNC Asia Holding Group Hary Tanoesoedibjo



3

Perkara Menarik Perhatian Publik:

- Kasus Pra Peradilan Dr Richard Lee
- Kasus Pembunuhan Mahasiswa Mataram
- Kasus Pembunuhan Sesama Polisi
- Kasus KDRT Sherly di Medan
- Kasus penyiraman air keras Andrie Yunus
- Kasus Pra Peradilan Roy Suryo



4

Perkara Tindak Pidana Korupsi:

- Kasus Amsal Sitepu di Medan
- Kasus Kerry Chalid di Jakarta
- Kasus Bupati Lampung
- Kasus Hilangnya 17 M dana nasabah BRI
- Kasus Bupati Blitar
- Kasus Bupati Sadewo Pati
- Kasus Mantan Bupati Sleman
- Kasus Chromebook Nadiem Makarim
- Kasus pemerasan dan gratifikasi Immanuel Ebenezer





#KinerjaKY

PENANGANAN LAPORAN MASYARAKAT

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA



PERIODE JANUARI - JUNI 2026

ALASAN MASYARAKAT MENYAMPAIKAN PERMOHONAN PEMANTAUAN KEPADA KOMISI YUDISIAL



1



Upaya pencegahan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam proses persidangan

2



Ketidaksesuaian hukum acara yang diterapkan majelis hakim saat persidangan berlangsung

3



Majelis hakim yang tidak profesional dalam memeriksa perkara

4



Adanya intervensi pihak luar terhadap proses persidangan

5



Majelis hakim yang tidak adil dalam proses persidangan



Pemohonan pemantauan yang disampaikan masyarakat menjadi bagian penting dari upaya Komisi Yudisial dalam mewujudkan peradilan yang **bersih, transparan, akuntabel, dan berkeadilan**.

